

## Dampak Krisis Global, 10.000 Buruh Subang Di-PHK Tahun Ini

SUBANG (IM)- Dampak krisis global, sebanyak 10.000 pekerja yang berada di Kabupaten Subang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama tahun 2022. Sebagai gambaran, menurut data Badan Pusat Statistik Subang, jumlah penduduk bekerja pada 2021 sebesar 763.589 orang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Subang, Yeni Nurani mengatakan, jumlah pesanan produksi barang ekspor ke luar negeri berkurang. Bahkan, tidak sedikit perusahaan juga yang mendapatkan batal pesanan. Dalam hal tersebut Yeni menyebut tentunya berdampak terhadap kondisi perusahaan.

"Pabrik-pabrik garmen tersebut biasanya mengekspor produknya ke Amerika dan juga Eropa. Tetapi, sekarang banyak yang membatalkan pesannya," ujar Yeni, kemarin.

Menurut Yeni, ribuan karyawan yang di-PHK itu berasal dari 25 pabrik yang ada di seluruh wilayah Subang. Yeni menjelaskan pabrik-pabrik tersebut seluruhnya bergerak di sektor garmen atau produksi pakaian jadi dan sebagainya yang sering mengekspor ke luar negeri.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan neraca perdagangan mengalami surplus sebesar US\$ 5,67 miliar pada Oktober 2022. Namun, dari hasil pemantauan langsung ke pabrik-pabrik, pihak Disnakertrans Subang mendapatkan laporan kondisi pesanan ekspor yang anjlok dalam kurun beberapa bulan terakhir, tepatnya pada bulan Oktober hingga November 2022.

"Kondisi itu dikhawatirkan memburuk pada 2023 sehingga perusahaan terpaksa melakukan efisiensi. Salah satunya memberhentikan karyawannya," katanya.

Meski demikian, Yeni memastikan hingga saat ini belum ada perusahaan garmen yang menutup pabriknya di Subang. Ia pun berharap kondisi krisis global tersebut segera membaik agar tidak berdampak lebih buruk bagi pekerja maupun perekonomian di Subang dapat

kembali pulih.

"Sekarang ini termasuk kejadian luar biasa untuk Subang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," ungkapnya.

Yeni mengaku telah mempersiapkan langkah untuk menghadapi gelombang PHK yang lebih buruk pada 2023. Namun, ia mengakui Pemerintah Kabupaten Subang tak memiliki upaya yang efektif.

Untuk mengurangi angka pengangguran maupun korban dari PHK, pihak Disnakertrans Subang sudah melakukan langkah efisien salah satunya yakni membuka calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di luar negeri.

Yeni mengungkapkan, saat ini moratorium Arab Saudi sudah dicabut. Hal itu tentunya dapat memberikan angin segar untuk mengurangi pengangguran serta korban PHK yang berada di Kabupaten Subang. Untuk moratorium Arab Saudi yang sudah dicabut tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan di Surabaya beberapa waktu lalu.

"Ini mudah-mudahan menjadi solusi di tengah gelombang PHK yang sangat luar biasa terjadi di Kabupaten Subang. Saat rakor bersama kementerian untuk moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi itu akan dibuka kembali insya Allah pada bulan Desember 2022," tuturnya.

Selain Arab Saudi, Negara Taiwan sendiri juga sudah membuka kembali tawaran PMI sejak bulan Agustus 2022 lalu. Yeni mengungkapkan angin segar lainnya pun akan dirasakan sebab peluang PMI bekerja di luar negeri tidak dibatasi dalam jumlah kuota.

"Dan itu memang pengiriman ke Taiwan maupun ke Arab Saudi itu memang banyak sekali diminati oleh PMI-PMI khususnya di Kabupaten Subang. Selama awal tahun 2022 sampai dengan akhir bulan Oktober ini sudah hampir 1.100 PMI yang berangkat ke beberapa negara seperti Taiwan, Arab Saudi, Singapura, Hongkong, dan Malaysia," pungkasnya. ● pra

## Kapolres Bogor: Mutasi Pejabat di Polri Demi Bergulirnya Dinamika Manajemen



Kapolres Bogor, AKBP DR Iman Imannudin, melantik 10 Pejabat Polres Bogor.

BOGOR (IM)- Kapolres Bogor, AKBP Dr. Iman Imannudin menyatakan, mutasi dan serah terima jabatan di lingkungan Polri merupakan proses yang terencana dengan tujuan demi bergulirnya dinamika manajemen sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dia menekankan, melalui mutasi jabatan untuk memberikan ruang jabatan kepada para pejabat baru dan untuk meniti karir ke jenjang jabatan berikutnya sesuai dedikasi kompetensi dan loyalitas yang diberikan kepada kesatuan ini.

"Kepada pejabat yang lama, saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas dedikasi selama menjabat sebagai Kasat maupun Kapolsek di jajaran Polres Bogor. Apa yang sudah dilakukan semoga menjadi ladang amal ibadah dan semoga di tempat yang baru dapat menjadi lebih baik lagi," tukas AKBP Iman Imannudin pada sambutan mutasi 10 perwira di lingkungan Polres Bogor.

"Bagi pejabat yang baru, saya ucapkan selamat datang di Polres Bogor. Diharapkan kepada para pejabat yang baru ini dapat segera beradaptasi dengan lingkungannya dan dapat segera menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Kapolres berpesan kepada personelnnya.

DR Iman Imannudin memaparkan, mutasi pejabat di lingkungan Polres Bogor sebanyak 10 perwira yang terdiri dari 3 PJU dan 7 Kapolsek yang mengalami pergeseran jabatan. Pelantikan dan upacara serah terima jabatan (Sertijab) sejumlah pejabat utama (PJU) dan kapolsek, serta juga korps raport kenaikan pangkat pengabdian anggota, digelar di Aula Sanika Satyawada Polres Bogor, Rabu (16/11).

Disebutkan upacara sertijab mulai dari Kasat Reskrim Polres Bogor yang semula dijabat

AKP Siswo De Culler Tarigan, diserahkan kepada AKP Yohanes Redhoi Sigiro. Kemudian Kasat Binmas Polres Bogor dari AKP Irrine Kania Defi, diserahkan kepada AKP Hendra Kurnia. Lalu Kasat Intelkam Polres Bogor dari AKP Aep Saepudin, diserahkan kepada AKP Bagus Aji Lesmana Putra.

Sementara jabatan Kapolsek yang mengalami pergeseran, di antaranya Kapolsek Babakan Madang yang semula dijabat Kompol Fredrik Ricky Wowor diserahkan kepada Kompol Wahyu Madurasyah Putra, Kapolsek Cileungsi dari Kompol Andri Fran Ferdyanan diserahkan kepada Kompol Zulkarnain, Kapolsek Cijeruk Kompol Sumijo diserahkan kepada Kompol Hida Tjahjono.

Sedangkan Kapolsek Rumpin Kompol Dali Saputra diserahkan kepada Kompol Sumijo, Kapolsek Klapanunggal AKP Bagus Azi Lesmana Putra diserahkan kepada AKP Irrine Kania Defi, dan Kapolsek Rancabungur yang semula dijabat AKP Tatang Hidayat diserahkan kepada Iptu Hartanto Rahim, serta Kapolsek Tanjungsari Iptu Hartanto Rahim diserahkan kepada Iptu Rustami.

Lebih jauh Kapolres Bogor Iman Imannudin mengemukakan, kepada anggota yang mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian, ucapan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan selama ini, semoga hal ini dapat menjadi motivasi dan teladan bagi anggota yang lain, karena tidak semua personil bisa mendapatkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya.

"Jalankan tugas dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab, terus berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegas Imannudin kepada jajarannya. ● gio

# 8 | Nusantara



## WASPADA CUACA EKSTREM

Pengendara melintasi jalan yang tergenang saat hujan di Jalan Raya Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/11). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kembali meminta masyarakat untuk tetap mewaspadaai potensi cuaca ekstrem yakni seperti hujan lebat disertai kilat atau petir, hujan es, dan puting beliung dalam sepekan kedepan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan, Papua Barat, dan Papua.

## Pemkab Bogor Optimistis Anggaran Terserap Maksimal Hingga Akhir Tahun

Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan, sedang menggenjot setiap perangkat daerah untuk merealisasikan anggaran, terlebih bagi perangkat daerah yang memiliki anggaran besar, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor.

CIBINONG (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor optimistis mampu menyerap APBD 2022 secara

maksimal hingga akhir tahun. "Jangan sampai terlalu banyak sisa anggaran. Saya sudah mengingatkan dinas-dinas yang

mempunyai anggaran besar," kata Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor, Iwan Setiawan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/11).

Iwan mengaku, sedang menggenjot setiap perangkat daerah untuk merealisasikan anggaran, terlebih bagi perangkat daerah yang memiliki anggaran besar, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor. Dari tiga perangkat daerah yang memiliki anggaran besar, realisasi anggaran tertinggi ditempati Disdik

dengan 80 persen.

"Beberapa pekerjaan sudah selesai tahap selanjutnya, hanya tinggal pekerjaan di lapangan, dan itu perlu pengawasan betul agar tepat waktu," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya menyebutkan, Pemkab Bogor hingga akhir Agustus 2022, masih menyisakan anggaran Rp 3,82 triliun. Angka itu masih terbelang besar lantaran target belanja sekitar Rp 8,5 triliun.

"Kita koordinasi dengan unit layanan pengadaan (ULP)

informasinya sebagian besar pekerjaan sudah masuk lelang. Tinggal nanti bagaimana realisasinya di lapangan. Karena berkaitan juga dengan realisasi serapan anggarannya," kata Teuku.

Menurut dia, penyebab lain yang membuat serapan anggaran rendah akibat alokasi bagian hasil pajak daerah (BHPRD) dan program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) belum seluruhnya digunakan. "Samisade kan alokasinya besar itu belum semua terserap. Selain itu ada BHPRD yang belum terserap juga seluruhnya," terang Teuku. ● gio

## Kades se-Kab. Bogor Dibekali Pengelolaan Keuangan Desa

BOGOR (IM)- Guna meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan melakukan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2022 Lingkup Kabupaten Bogor. Workshop di Gedung Tegar Beriman, Rabu (16/11).

Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, dirinya sangat mendukung kegiatan workshop yang dilakukan oleh BPKP Jawa Barat yang dapat mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor, serta dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bogor.

"Kegiatan ini sangat bagus untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman para Kades. Akselerasi percepatan pembangunan, kita dukung dengan kegiatan sekolah pemerintahan desa bekerjasama dengan IPB University dan dioptimalkan dengan bantuan keuangan Satu Miliar Satu Desa (Samisade)," terangnya.

Menurut Plt. Bupati Bogor, penyelenggaraan sekolah Pemerintahan Desa yang bekerjasama dengan IPB University masuk tahun kedua, dimaksudkan agar pemerintahan desa belajar ke IPB, di bawah pembinaan para akademisi yang memang ahli di bidang

pemerintahan desa.

"Sehingga bisa menambah wawasan dan kami berharap para kepala desa yang sudah mengikuti sekolah pemerintahan desa itu, bisa mengaplikasikan hasil yang sudah didapat, kita bertahap tahun yang akan datang juga akan terus dilaksanakan," ungkap Iwan Setiawan.

Berkaitan dengan Dana Desa untuk mencegah terjadinya inflasi daerah, 20% Dana Desa diperuntukkan bagi program ketahanan pangan. Bahkan dirinya sudah sosialisasikan kepada para Camat dan Kepala Desa berkaitan dengan hal tersebut.

"Kabupaten Bogor siap untuk membantu desa yang ingin menggunakan 20% untuk ketahanan pangan ini, kami sudah ada tiga perangkat daerah, yang siap membantu dan mendampingi para Kades seperti, Dinas Ketahanan Pangan, Distanhorbun, dan Diskanak," paparnya.

Selanjutnya, Kepala Bagian Umum BPKP Provinsi Jawa Barat, Jun Suwarno menerangkan bahwa pengelolaan dana desa harus mengembarkan, yang pertama adalah akuntabilitas kinerja keuangan, yang kedua akuntabilitas kinerja pembangunan, yang ketiga adalah pengelolaan dan pemanfaatan aset desa. ketiga hal itu menjadi sangat penting didalam pengelolaan keuangan desa, sehingga, diarahkan

jangsan sampai semua dana atau uang yang ada di desa dari dana desa atau dari sumber-sumber lain di desa keluar tanpa adanya outcome atau hasil yang jelas bagi kesejahteraan masyarakat di desa.

Oleh karena itu spending atau belanja-belanja yang bersumber dari keuangan desa harus mampu memberikan akses pekerjaan sehingga akses pendapatan bagi warga desa pun akan terwujud. Di samping itu program dan kegiatan belanja-belanja desa harus mampu dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan aksesibilitas kesehatan maupun aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat di desa sesuai kewenangan pemerintah desa," jelas Jun Suwarno.

Dikatan Iwan Setiawan, mulai sekarang dan kedepannya program-program dan kegiatan di desa harus diarahkan mencapai Sumber Daya Desa (SDD) secara nyata dan bukan hanya sekedar untuk mencapai angka-angka belaka.

"Untuk itu perlu adanya kolaborasi dalam proses keuangan dan pembangunan yang ada di desa secara efektif dengan menayakan arah dan sasaran atau tujuan, bukan sekedar ordinasi yang tentu banyak mengandalkan pada tujuan masing-masing instansi yang terlibat didalamnya tanpa memperhatikan hasil outcome yang akan dicapai pada proses pembangunan desa," tukasnya. ● gio



BPKP Jabar menggelar Workshop bersama Pemkab Bogor tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## Dana Cadangan Pilkada 2024 di Kota Bogor Sebesar Rp71,3 Miliar

BOGOR (IM)- Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Bogor yang telah menetapkan Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Tahun 2024 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Adapun jumlah Dana Cadangan Pilkada Kota Bogor Tahun 2024 mendatang sebesar Rp71,3 miliar yang bersumber dari APBD Kota Bogor. "Perda ini merupakan langkah strategis kita dalam mempersiapkan Pilkada Kota Bogor dengan optimal," ungkap Dedie, Kamis (17/11).

Dedie melanjutkan, adapun jumlah Dana Cadangan Pilkada Kota Bogor Tahun 2024 sebesar Rp 71,3 miliar yang bersumber dari APBD Kota Bogor Tahun 2023 sebesar Rp 50 miliar dan Perubahan APBD Kota Bogor Tahun 2023 sebesar Rp 21,3 miliar.

"Saya berharap proses dan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu di Kota Bogor pada tahun 2024 nanti berjalan dengan lancar, aman, damai dan demokratis sesuai dengan harapan masyarakat," tutur Dedie.

Dedie memaparkan, DPRD Kota Bogor sudah menyetujui

dalam rapat paripurna, tentunya untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Tahun 2024 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

"Kemarin juga saya membacakan pendapat akhir Wali Kota Bogor, Bima Arya terhadap raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Tahun 2024 didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah. Kemarin rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin," paparnya.

Selain menyampaikan apresiasi, disetujuinya dana Pilkada 2024 mendatang, Dedie juga mengajak pimpinan dan anggota DPRD serta segenap warga Kota Bogor untuk mendoakan dan memberi dukungan untuk para Atlet Kota Bogor yang sedang berlaga di Porprov XIV Jawa Barat. "Saat ini Kota Bogor menduduki peringkat ke-4 dengan perolehan sementara 44 emas, 34 perak dan 37 perunggu dari target perolehan 90 emas," pungkasnya. ● jay

TERIMA 1.000 LAPORAN TIAP BULAN

## Perumda Tirta Pakuan Terapkan Strategi Ini Tangani Kebocoran

BOGOR (IM)- Perumda Tirta Pakuan setiap bulan menerima sekitar 1.000 laporan dari warga terkait kebocoran pipa. Untuk menangani hal itu, Tirta Pakuan punya berbagai strategi demi memperbaiki dan menyelesaikan laporan kebocoran dari warga, kata Direktur Teknik (Dirtek) Perumda Tirta Pakuan, Ardani Yusuf, Kamis (17/11).

"Menjelang akhir tahun 2022, salah satu yang jadi perhatian Perumda Tirta Pakuan yakni persoalan kebocoran yang erat dengan potensi kehilangan air. Selain laporan dari warga, ada juga informasi dari FKP yang membantu kami, yang kemudian ditindak lanjut oleh kami melalui sub departemen kebocoran," ungkap Ardani.

Ardani melanjutkan, dapat diketahui informasi laporan kebocoran setiap bulan itu lebih dari 1.000 laporannya. Tapi Alhamdulillah penyelesaian perbaikannya dipenuhi 100 persen. Ia juga memastikan semua laporan dan aduan yang masuk disikapi

oleh Perumda Tirta Pakuan. "Jelang akhir tahun ini, kami fokus menindaklanjuti kebocoran pipa, baik pipa kecil maupun pipa besar. Beberapa tim kami bagi, untuk perbaikan pipa kecil dan besar. Ada satu tim yang menggunakan sepeda motor, itu untuk perbaikan pipa kecil berdiameter 2 inch kebawah," tuturnya.

Ardani memaparkan, sedangkan tim lainnya, menggunakan mobil untuk perbaikan pipa besar yakni pipa 4 inch keatas. "Secara umum, ada empat tim yang dikerahkan dalam 3 shift untuk perbaikan kebocoran, memang potensi kehilangan air akibat kebocoran sangat berpengaruh terhadap pendapatan," paparnya.

"Itu jadi perhatian dan urgen buat kami. Bicara target, tahun ini Alhamdulillah kami selesaikan target perbaikan di banyak titik. Kami sangat konsen terhadap potensi kehilangan air akibat kebocoran. Ya tentu kami berharap upaya itu terpenuhi demi kualitas pelayanan yang baik," pungkas Ardani. ● jay